

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang

Abdur Rokhim¹ Ratna Wiyanti Daniar Paramita² Wahyuning Murniati³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widyagama Lumajang
abdurrokhim1995@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien harus dilakukan secara optimal, karena seringkali realisasi tidak sesuai dengan target. Berdasarkan hal tersebut tentang pentingnya mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, maka penulis tertarik untuk menganalisis bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data APBDes Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang periode anggaran 2016 sampai dengan 2017. Untuk menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa dihitung dengan rasio efisiensi dan rasio efektivitas keuangan desa. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berada pada tingkat pengelolaan keuangan desa yang kurang efisien. Sementara itu, tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang berada pada tingkat pengelolaan keuangan desa yang efektif.

Kata Kunci: Efisiensi, Efektivitas, dan Pengelolaan Keuangan Desa

Abstract

This study aims to determine the level of efficiency and effectiveness of village financial management in the Nguter village Pasirian Sub-district Lumajang District. Effective and efficient local financial management should be done optimally, as often the realization is not in line with the target. Based on this matter about the importance of optimizing the budget efficiently and effectively the management of village finances, the authors are interested to analyze how the efficiency and effectiveness of village financial management in Nguter Village Pasirian Sub-district Lumajang District. The data used are secondary data that is APBDes Nguter Village Pasirian Sub-district Lumajang District budget period 2016 until 2017. Then level of efficiency and effectiveness of village financial management is calculated with efficiency ratio and ratio of effectiveness of village finance. The methodology used of this study is descriptive method with quantitative approach. The results of this study indicate that the level of efficiency of village financial management in Nguter Village Pasirian Sub-district Lumajang District is on the level of management of village finances that are efficient less. Meanwhile, the level of effectiveness of village financial management in Nguter Village Pasirian Sub-district Lumajang District is on the effective level village financial management.

Keywords: Efficiency, Effectiveness, and Village Financial Management

PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa mempunyai hak untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai dengan kondisi serta sosial budaya setempat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif harus dilakukan secara optimal, karena seringkali realisasi tidak sesuai dengan target.

Efisiensi merupakan pencapaian output yang maksimum dengan penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi adalah perbandingan antara input dan output yang dikaitkan dengan standar kinerja atau sasaran yang sudah ditentukan. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya.

Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil kerja dengan sasaran yang telah ditentukan. Secara sederhana efektivitas adalah perbandingan *outcome* dengan output. Efektivitas adalah hubungan antara output dengan tujuan. Suatu program, kegiatan, atau organisasi dinilai efektif apabila output yang dihasilkan dapat mencapai tujuan yang diharapkan atau dikatakan *spending wisely*.

Dalam prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran, hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana memanfaatkan uang sebaik atau serendah mungkin supaya dapat menghasilkan perbaikan pelayanan kesejahteraan yang maksimal guna kepentingan masyarakat dalam kutipan Trianto (2014). Secara umum, kekurangan yang begitu terlihat dari anggaran selama ini adalah keterbatasan daerah dalam mengembangkan metode alat perencanaan anggaran yang mengarah pada kinerja, bukan pendekatan instrumental yang sangat lemah landasan pertimbangannya. Oleh karena itu, dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan tingkat efektivitas kegiatan dan efisiensi alokasi dalam mencapai tujuan yang jelas. Dalam hal tersebut, maka penetapan standar harga satuan, kinerja proyek, serta kegiatannya adalah faktor penentu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi anggaran untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian mengenai keterkaitan anggaran dengan kinerja instansi sektor publik sudah banyak dilakukan sebelumnya. Siregar, dkk (2017) meneliti tentang Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa analisis efektivitas pada ADD terlihat beragam di Kabupaten Deli Serdang, jika dilihat dari analisis lebih lanjut, hal tersebut dapat terjadi karena kemampuan penyerapan anggaran pada desa yang memiliki rasio efektif 100% sangat baik, beberapa program dilakukan sesuai dengan kemampuan anggaran, sehingga dana ADD dapat dipergunakan secara keseluruhan, namun sebaliknya desa Medan Estate dinilai belum mampu melakukan penyerapan anggaran secara baik dan maksimal, Pada analisis Efisiensi terlihat bahwa Pengelolaan Keuangan Desa kabupaten Deli Serdang tahun anggaran 2016, melalui penggunaa ADD dan DD tahun 2016, cenderung terlihat bahwa masih kurang efisien, baik itu penggunaan ADD maupun DD, meskipun beberapa desa terlihat mampu mengefisienkan ADD maupun DD pada tahun tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dengan hanya berfokus pada pengelolaan keuangan desa peneliti berharap dapat lebih mendalami persoalan yang ada pada tahapan pengelolaan tersebut, serta pentingnya mengoptimalkan anggaran secara efisien dan efektif dalam pengelolaan keuangan desa, maka peneliti tertarik untuk menganalisis bagaimana tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Desa

Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 menyatakan desa merupakan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keuangan Desa

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa "Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa".

Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa "Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban keuangan desa". Pengelolaan keuangan desa adalah rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya.

Pendapatan Desa

Permendagri No. 113 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pendapatan desa merupakan segala penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Belanja Desa

Belanja desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 meliputi segala pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan perencanaan keuangan tahunan pemerintahan desa. APBDes merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara badan permusyawaratan desa dan pemerintah desa yang berisi tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa selama satu tahun dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.

Efisiensi

Mardiasmo (2009:132) berpendapat bahwa Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara output/keluaran yang dihasilkan terhadap input/masukan yang digunakan (*cost of output*). Proses kegiatan operasional dapat disebut efisien apabila suatu hasil kerja atau produk tertentu bisa dicapai dengan menggunakan dana dan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).

Efektivitas

Mardiasmo (2009:132) berpendapat bahwa Efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Efektivitas adalah hubungan antara keluaran/output dengan target atau tujuan yang harus dicapai. Kegiatan operasional dapat disebut efektif apabila proses kegiatan tersebut mencapai tujuan akhir kebijakan (*spending wisely*).

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dengan menggunakan metode deskriptif ini peneliti akan dapat menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan kenyataan atau keadaan sebenarnya. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif yang dapat menggambarkan secara terperinci analisisnya setelah meneliti keadaan di lapangan. Metode deskriptif merupakan metode yang tepat digunakan dalam penelitian ini, karena peneliti ingin mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.

Obyek Penelitian

Obyek penelitian pada penelitian ini yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sumber dan Jenis Data

Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor yang penting untuk dijadikan pertimbangan dalam metode pengumpulan data. Sumber data pada penelitian ini adalah data internal yang berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut adalah data Laporan Keuangan Kantor Desa Nguter yang berupa APBDes.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan digunakan agar dapat memperoleh data yang benar, akurat dan relevan agar dapat dijadikan acuan dalam suatu penelitian. Jenis data yang diperlukan yaitu data sekunder. Maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menyalin dokumen yaitu APBDes.

Variabel Penelitian

Identifikasi Variabel

Variabel penelitian Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dengan indikator sebagai berikut:

- 1) Efisiensi dan Efektivitas
- 2) Pengelolaan Keuangan Desa

Definisi Konseptual Variabel

- 1) Efisiensi dan Efektivitas

Menurut Muindro Renyowijoyo (2008:4) Efisiensi merupakan pencapaian keluaran (*output*) yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi adalah perbandingan keluaran atau masukan yang dikaitkan dengan sasaran atau standar kinerja yang telah ditentukan. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil kerja dengan sasaran yang telah ditentukan. Secara sederhana efektivitas adalah perbandingan antara hasil/*outcome* dengan keluaran/*output*.

- 2) Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Permendagri No. 113 Tahun 2014).

Definisi Operasional Variabel

- 1) Rasio Efisiensi

Efisiensi dapat diukur menggunakan rasio antara masukan dengan keluaran. Semakin kecil keluaran dibanding masukan, maka semakin rendah tingkat efisiensi suatu organisasi. Efisiensi pengelolaan keuangan desa dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi belanja desa terhadap realisasi pendapatan desa dikalikan dengan seratus dalam bentuk presentase.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Desa}}{\text{Realisasi Pendapatan Desa}} \times 100 \%$$

- 2) Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas adalah gambaran kemampuan pemerintah desa dalam membandingkan realisasi pendapatan asli desa dengan target pendapatan asli desa dan dikalikan seratus dalam bentuk presentase. Semakin tinggi tingkat rasio efektivitas, maka menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Desa}}{\text{Target Pendapatan Asli Desa}} \times 100 \%$$

- 3) Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan Keuangan Desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Instrumen Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel penelitian, yaitu efisiensi dan efektivitas. Oleh karena itu instrumen penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif yaitu efisiensi yang melihat pada realisasi belanja desa dan realisasi pendapatan desa, sedangkan efektivitas yang melihat pada realisasi pendapatan asli desa dan target pendapatan asli desa. Yang diukur tingkat efisiensi dan efektivitasnya sesuai dengan pedoman Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996.

Yang mengkategorikan efisiensi kedalam lima tingkat sebagai berikut:

- 1) Di atas 100% = Tidak efisien
- 2) 90% - 100% = Kurang efisien
- 3) 80% - 90% = Cukup efisien
- 4) 60% - 80% = Efisien
- 5) Kurang dari 60% = Sangat efisien

Kategori efektivitasnya juga dibagi menjadi lima tingkat sebagai berikut:

- 1) Di atas 100% = Sangat efektif
- 2) 90% - 100% = Efektif
- 3) 80% - 90% = Cukup efektif

- 4) 60% - 80% = Kurang efektif
 5) Kurang dari 60% = Tidak efektif

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik dan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan beserta pengujiannya. Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan menggunakan data kuantitatif. Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Mengumpulkan data penelitian berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Nguter mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.
- Menganalisis data berdasarkan variabel penelitian.
- Menghitung tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa.
- Hasil analisis data diukur tingkat efisiensi dan efektivitasnya sesuai dengan pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996.
- Pembahasan dan menyimpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Obyek Penelitian Pengelolaan Keuangan Desa Nguter

Pengelolaan keuangan desa memiliki prinsip-prinsip atau azas-azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran".

1. Transparan

Transparan dalam pengelolaan keuangan desa memiliki arti bahwa segala kegiatan dan informasi terkait pengelolaan keuangan desa diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dalam hal itu, Pemerintah Desa Nguter telah memenuhi asas transparan dalam pengelolaan keuangan desa. Dengan memberikan kemudahan bagi siapapun dan kapan saja untuk mengetahui, mengakses dan mendapatkan informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa Nguter.

2. Akuntabel

Akuntabel memiliki arti bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah/lembaga dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang mempunyai hak atau kewenangan untuk meminta keterangan akan pertanggungjawaban. Asas ini menuntut Kepala Desa Nguter mempertanggungjawabkan dan melaporkan pelaksanaan APBDes secara tertib kepada masyarakat maupun kepada jajaran pemerintahan di atasnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dari Pemerintah Desa Nguter yang melaporkan pengelolaan keuangan desa kepada pemerintahan di atasnya maupun perwakilan masyarakat secara berkala.

3. Partisipatif

Partisipatif memiliki arti bahwa setiap tindakan dilakukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Dalam hal ini, Pemerintah Desa Nguter telah membuka ruang untuk peran dan keterlibatan efektif masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa. Hal tersebut dapat menumbuhkan rasa memiliki dan meningkatkan keswadayaan masyarakat.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Tertib dan disiplin anggaran memiliki arti bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan prinsip akuntansi keuangan di desa. Pengelolaan Keuangan Desa Nguter sudah sesuai dengan prosedur atau prinsip akuntansi keuangan di desa serta taat dengan hukum yang berlaku. Hal tersebut untuk meningkatkan profesionalitas dan menghindari penyimpangan dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil Pengumpulan Data

Analisis data diperlukan untuk menjawab perumusan masalah dan tercapainya tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yang merupakan data sekunder. Data sekunder yang peneliti gunakan berupa data Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yang diperoleh dari Desa Nguter.

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pemerintah Desa Nguter, dapat diketahui bahwa realisasi pendapatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan. Dengan perincian pada tahun 2016 realisasi pendapatan sebesar Rp 1.697.665.035,78 dan pada tahun 2017 realisasi pendapatan sebesar Rp 2.591.466.839,08.

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa digunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan kewenangan desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes pemerintah Desa Nguter, diketahui bahwa realisasi belanja dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 juga mengalami peningkatan. Dengan perincian pada tahun 2016 realisasi belanja sebesar Rp 1.696.236.023,00 dan pada tahun 2017 realisasi belanja sebesar Rp 2.590.114.070,00.

Dari data tersebut diketahui bahwa dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 realisasi pendapatan melebihi realisasi belanja. Begitu pula dengan Pendapatan Asli Desa (PAD) pada dua tahun tersebut juga mengalami peningkatan, serta realisasi PAD yang selalu melebihi anggaran PAD.

Hasil Analisis Data

Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Nguter

Efisiensi pengelolaan keuangan desa dapat dihitung dengan perbandingan antara realisasi belanja desa terhadap realisasi pendapatan desa dikalikan dengan seratus dalam bentuk presentase. Dengan menggunakan formulasi efisiensi menurut Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, maka tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa Desa Nguter adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa Nguter
Tahun 2016-2017

Tahun	Realisasi Belanja	Realisasi Pendapatan	Efisiensi	Keterangan
2016	1.696.236.023,00	1.697.665.035,78	99%	Kurang efisien
2017	2.590.114.070,00	2.591.466.839,08	99%	Kurang efisien

Sumber: Data diolah, 2018

Tabel diatas menjelaskan hasil perhitungan rasio efisiensi dalam dua tahun anggaran yang tertera di kolom keempat, sedangkan di kolom pertama mencantumkan tahun anggaran yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2017. Kolom kedua adalah realisasi belanja yang dibagi dengan realisasi pendapatan pada kolom ketiga.

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada tingkat kurang efisien, dengan presentase tingkat efisiensi rata-rata sebesar 99%. Hal tersebut menunjukkan takaran penggunaan belanja yang lebih dari 90% dibanding jumlah pendapatan. Dalam istilah ekonomi dan keuangan hal tersebut adalah keadaan yang tidak efisien. Hal itu terjadi karena belanja pada setiap bidang mengalami peningkatan, seperti belanja pegawai yang meningkat karena penambahan jumlah pejabat, rekening listrik dan telepon yang tarifnya semakin meningkat, perlengkapan operasional perkantoran, pembangunan dan pemeliharaan wisata yang dimiliki desa, pembangunan sarana dan prasarana desa yang baru, misalnya: pembangunan jalan desa, gapura batas desa, dan saluran irigasi air tersier.

Dalam keadaan tersebut, berarti Desa Nguter dalam dua tahun tersebut kurang efisien dalam mengelola keuangannya, karena anggaran belanja desa yang masih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan desa. Dari hasil data itu terlihat bahwa realisasi belanja tidak dimaksimalkan dengan pendapatan yang diperoleh Desa Nguter. Terlihat dari realisasi pendapatan yang lebih besar daripada realisasi belanja.

Semakin besar nilai rasio efisiensi keuangan maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter. Hal ini menyangkut perbandingan input dan output pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan dan pelayanan publik. Semakin besar belanja artinya semakin besar input yang digunakan. Input yang terlampau besar dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dalam ekonomi. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila mencapai hasil yang baik dengan pengorbanan biaya yang sedikit.

Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Nguter

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam merealisasikan pendapatan asli desa yang direncanakan dibandingkan dengan target pendapatan asli desa dengan dikalikan seratus dalam

bentuk presentase. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan desa yang semakin baik. Kriteria rasio efektivitas pengelolaan keuangan desa juga diambil dari kriteria penilaian yang ditentukan oleh Departemen Dalam Negeri melalui Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan. Efektivitas pengelolaan keuangan Desa Nguter dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Nguter
Tahun 2016-2017

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi PAD	Efektivitas	Keterangan
2016	230.935.103,28	231.179.212,78	100%	Efektif
2017	231.179.212,78	232.531.769,08	100%	Efektif

Sumber: Data diolah, 2018

Berdasarkan APBDes Nguter dapat diketahui secara langsung besarnya pendapatan asli desa dengan realisasinya yang bisa dinyatakan dalam bentuk nilai nominalnya atau persentasinya. Pada tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Nguter pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada tingkat yang efektif. Berdasarkan perhitungan dari formulasi di atas tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Nguter telah stabil, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 100%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Nguter adalah sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Nguter dalam merealisasikan pendapatan asli desa berdasarkan potensi riil desa dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sudah sangat baik.

Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan Hasil Analisis Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara output/keluaran yang dihasilkan terhadap input/masukan yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat disebut efisien apabila suatu hasil kerja atau produk tertentu bisa dicapai dengan menggunakan dana dan sumber daya yang serendah-rendahnya

Berdasarkan hasil analisis tersebut menyatakan bahwa tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada tingkat kurang efisien, dengan presentase tingkat efisiensi rata-rata sebesar 99%. Hal tersebut menunjukkan takaran penggunaan belanja yang lebih dari 90% dibanding jumlah pendapatan. Dalam istilah ekonomi dan keuangan hal tersebut adalah keadaan yang tidak efisien. Hal itu terjadi karena belanja pada setiap bidang mengalami peningkatan, seperti belanja pegawai yang meningkat karena penambahan jumlah pejabat, rekening listrik dan telepon yang tarifnya semakin meningkat, perlengkapan operasional perkantoran, pembangunan dan pemeliharaan wisata yang dimiliki desa, pembangunan sarana dan prasarana desa yang baru, misalnya: pembangunan jalan desa, gapura batas desa, dan saluran irigasi air tersier.

Dalam keadaan tersebut, berarti Desa Nguter dalam dua tahun tersebut kurang efisien dalam mengelola keuangannya, karena anggaran belanja desa yang masih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan desa. Dari hasil data itu terlihat bahwa realisasi belanja tidak dimaksimalkan dengan pendapatan yang diperoleh Desa Nguter. Terlihat dari realisasi pendapatan yang lebih besar daripada realisasi belanja.

Semakin besar nilai rasio efisiensi keuangan maka semakin tidak efisien pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter. Hal ini menyangkut perbandingan input dan output pelaksanaan kegiatan/proyek pembangunan dan pelayanan publik. Semakin besar belanja artinya semakin besar input yang digunakan. Input yang terlampau besar dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan tidak sesuai dengan prinsip efisiensi dalam ekonomi. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila mencapai hasil yang baik dengan pengorbanan biaya yang sedikit.

Pembahasan Hasil Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa

Efektivitas merupakan ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Suatu organisasi telah dikatakan telah berjalan dengan efektif apabila suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuannya. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut menyatakan bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Nguter pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada tingkat yang efektif. Dari hasil tersebut juga terlihat bahwa tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Nguter telah stabil, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 100%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Nguter adalah sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah Desa Nguter dalam

merealisasikan pendapatan asli desa berdasarkan potensi riil desa dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sudah sangat baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang mulai Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017. Berdasarkan pembahasan pada uraian sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 berada pada tingkat kurang efisien. Dengan presentase rasio tingkat efisiensi pengelolaan keuangan desa mencapai 99%. Yang berarti bahwa efisiensi pengelolaan keuangan desa pada kedua tahun tersebut masih kurang efisien karena anggaran belanja desa yang masih tinggi jika dibandingkan dengan anggaran pendapatan desa.
2. Tingkat efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 cenderung stabil, dengan tingkat efektivitas rata-rata sebesar 100%. Dengan demikian berarti tingkat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Nguter adalah sudah efektif, hal ini menunjukkan bahwa kinerja pemerintah dalam merealisasikan pendapatan asli desa berdasarkan potensi riil desa dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 sudah sangat baik.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dan hasil kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Agar belanja Desa Nguter lebih efisien, maka Pemerintah Desa dalam hal ini perlu mengkaji antara sektor yang produktif dengan sektor yang kurang produktif, kemudian memotong anggaran di sektor yang kurang produktif dan mengalihkannya ke sektor yang lebih produktif.
2. Agar belanja yang dikeluarkan dapat efisien dan efektif, maka hal penting yang perlu dilakukan adalah membuat perencanaan yang matang, berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan, penganggaran yang sesuai dengan standar harga/biaya yang berlaku, pelaksanaan yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2015. *Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa*. Erlangga: Jakarta
- Dethan, Stevany H. 2016. *Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat*. Media Bina Ilmiah. Vol. 10, No. 12
- Halim, Abdul. 2016. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat: Jakarta
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. CV Andi Offset: Yogyakarta
- Novita, Dian. 2016. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 di Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa*. 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. 2005
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 2014
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa*. 2015
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. 2014
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Mitra Wacana Media: Jakarta
- Rondonuwu, Ritno H. dkk. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa*. Jurnal EMBA. Vol. 3, No. 4. Hal 23-32

- Rosyida, Ainur. 2017. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sumpersuko Kecamatan Sumpersuko Kabupaten Lumajang*. STIE Widyagama Lumajang: Lumajang
- Siregar, F.A dan Fazli S.B.Z. 2017. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa : Studi pada Desa di Kabupaten Deli Serdang*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA). Vol. 2, No. 4
- Sumenge, Ariel S. 2013. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Minahasa Selatan*. Jurnal Emba. Vol. 1, No. 3. Hal 74-81
- Suoth, N. dkk. 2016. *Pengukuran Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset (DPKPA) Kabupaten Minahasa Selatan*. Jurnal Emba. Vol. 4, No. 1. Hal 613-622
- Trianto, Anton. 2014. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kota Palembang*. ISSN Cetak: 1978-6579. ISSN Online: 2477- 2984
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tentang Desa*. 2014
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tentang Pemerintahan Daerah*. 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. 1999
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah*. 2004
- Yuliansyah dan Rusmianto. 2016. *Akuntansi Desa*. Salemba Empat: Jakarta
- Yunianti, Umi. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. ISBN 978-602-73690-3-0